

KONTRIBUSI SOSIOLINGUISTIK DALAM PEMAHAMAN KOMUNIKASI POLITIK

Oleh: Ruslan

“Seseorang tidak cukup hanya mengetahui apa yang pantas dikatakan, tetapi wajib mengatakannya sebagaimana yang sepantasnya” (Ariestoteles).

I. **Prakata.**

Salah satu fungsi mendasar bahasa adalah bahasa sebagai media komunikasi. Dan peranannya sangat menentukan dalam kehidupan social kemasyarakatan dalam berbagai aspeknya. Tidak terkecuali bidang politik karena dengan bahasa seseorang dapat menyampaikan pikirannya, mengekspresikan jiwa dan kepribadiaannya. Pakar sosiologi berkata “ ruh dan karkater suatu kaum tercermin dalam tindak tutur bahasanya “. Seorang politikus ketika berada di pentas gelanggang politik akan menggunakan bahasa politik, seorang seniman akan menggunakan bahasa seni ketika berada diatas panggung seni dan seterusnya. Artinya bahwa bahasa adalah sarana yang paling jujur untuk menyampaikan misi seseorang, membawakan kepentingan pemakainya kepada kelompok masyarakat yang lebih luas. Ilmu bahasa yang mempelajari penggunaan bahasa dalam kaitannya dengan kehidupan social termasuk tindak hasilan yang ditimbulkannya adalah sosiolinguistik.

Secara etimologi sosiolinguistik jelas terdiri dari dua unsur; *sosio* dan *linguistic*. Unsur linguistik berarti ilmu kebahasaan yang mengkaji unsur-unsur bahasa serta hubungan unsur-unsur itu dalam memenuhi fungsinya sebagai alat perhubungan antarmanusia. Sedangkan unsur sosio seakar denga sosial, yaitu yang berhubungan dengan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dan fungsi-fungsi kemasyarakatan. Jadi sosiolinguistik secara terminology artinya studi atau pembahasan dari bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. Boleh juga dikatakan bahwa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakaatan bahasa, khususnya variasi yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan factor-faktor kemasyarakaatan (sosial).¹

Sebelum munculnya penamaan sosiolinguistik sebagai salah satu cabang ilmu bahasa terapan (applied Linguistics), sociology dan linguistics masing-masing berdiri sendiri tanpa menyadari adanya korelasi-korelasi positif antara kedua cabang ilmu terebut. Ilmu bahasa

¹ Nababan, P.W.J., sosiololinguistik, suatu pengantar. Gramedia, Jakarta : 1984. h. 2

mencurahkan segenap perhatiannya terhadap kajian-kajian ilmiah tentang kebahasaan (bahasa lisan, tulisan, hidup, dan bahasa mati) sesuai dengan tuntutan kaidah-kaidah ilmiah ketika itu.² Sementra cabang ilmu sociology menfokuskan diri pada kajian ilmiah terhadap kaidah-kaidah social atau sitem-sistem social yang berkembang ketika itu. Dan dalam perkembangannya sebagian besar pakar sosiologi asal Francis lebih cendrung memosisikan sociology ini melihat lebih jauh realitas-realitas social, atau fenomena-fenomena social, atau hubungan-hubungan sosial, atau bangunan masyarakat sebagai objek kajian.³

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, linguistik berupaya mengembangkan sayapnya dengan mengkaji fenomena-fenomena kebahasaan dalam konteks social. Yakni menerapkan hasil kajian teoritis linguistik terhadap realitas kehidupan manusia sebagai pemakai bahasa yang bersifat non-linguistik. Dengan demikian lahirlah kemudian linguistik terapan (Applied Linguistik), dan salah satu cabangnya adalah Soslolinguistik. Pada sisi yang sama Para pakar sosiologi tertarik melihat adanya hubungan yang sangat erat antara karakteristik masyarakat dengan bahasa. Termasuk fungsi-fungsi social dan penggunaan bahasa dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, lahirlah sosiolinguistik, yaitu cabang ilmu yang berupaya menemukan titik temu anantara bahasa dan masalah-masalah social. Dalam sejarahnya diketahui bahwa ilmu ini muncul pada tahun 1960-an. Dan secara fungsional, pada aspek tertentu, ilmu ini lebih menfokuskan pengkajiannya terhadap masalah “ parole “, yakni tindakan berutur dalam segenap aktifitas sosial. Mereka melihat bahwa lahirnya parole tersebut sangat ditentukan dan diwarnai dengan perangai atau perilaku bertutur, yang lebih dikenal dalam ilmu kebahasaan *language behaviour* (as-Suluk al-Lughawiy).

Kajian kita terhadap bagaimana kontribusi sosiolinguistik dalam pemahaman komunikasi politik, akan dititik beratkan pada bagian-bagian tertentu saja; yaitu pada pengkajian penggunaan bahasa atau laku bahasa oleh beberapa tokoh politik atau penentu kebijakan dalam suatu institusi. Aspek ini biasa disebut dengan *ethnografi berbahasa*. Yaitu mengkaji unsur-unsur yang terdapat dalam tindak berbahasa dan kaitannya dengan, atau pengaruhnya terhadap, bentuk dan pemilihan bahasa yang digunakan. Pemilihan akan satu variasi dari beberbagai varisi berbahasa ditentukan oleh unsur-unsur non linguistik. Yaitu situasi dan keadaan berbahasa, siapa

² Dr. Muhammad Hasan Abd. Aziz, Ilmu al-Lughah al-Ijtima'iy, Makmtabahtul adab, Cairo: 2009, h. 15.

³ Ibid. h.19.

yang berbicara, di tempat mana dia berbicara, masalah apa yang dibicarakan, apa tujuannya dan sebagainya.

II. Bahasa dalam Komunikasi Politik.

Kalau kita menengok sejenak ke beberapa peristiwa bersejarah yang dirasakan oleh bangsa ini di masa lalu, maka kita menemukan beberapa dalil untuk mengatakan bahwa kekuatan bahasa seorang orator politik, pemimpin bangsa mampu menghidupkan semangat herois bangsa yang lemah terjajah menghadapi bangsa yang perkasa sang penjajah. Mempertaruhkan jiwa dan raganya menyongsong kemerdekaannya. Komunikasi politik pemimpin bangsa selalu terkait dengan situasi dan kemajuan bangsa yang bersangkutan. Jika seorang pemimpin komunikasi politiknya lemah, misalnya saja tidak konsistensi “ asal bocara “, hamper bisa dipastikan wibawa kepemimpinannya akan menurun. Situasa dan kondisi juga cenderung kacau. Setidaknya komunikasi politik masyarakat yang dipimpinnya juga tidak sehat. Sebaliknya jika pemimpinnya memiliki kemampuan melakukan komunikasi politik yang baik ia akan memperoleh trust dari masyarakat yang dipimpinnya. Komunikasi yang seperti itu merupakan modal kuat untuk menghadirkan kepemimpinan yang kokoh, menyejahterakan masyarakatnya.

Komunikasi politik merupakan gabungan dua unsur yang berbeda namun terkait sangat erat, yakni “ komunikasi” dan “ politik “. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang pengertian komunikasi politik, sebaiknya terlebih dahulu diketengahkan tentang pengertian komunikasi dan politik.

Komunikasi (dalam pengertian sederhana) adalah proses interaksi kemanusiaan yang digunakan seseorang atau kelompok untuk memindahkan makna, gagasan atau pemikiran, serta perasaan kepada orang lain ataupun kelompok lain, komunikasi dapat dianggap efektif atau sukses jika apa yang dimaksudkan oleh pembicara sampai kepada lawan bicara, dan inilah dasar dari segala proses terjadinya kontak social.⁴Salah seorang pakar sosiolinguistik dan antropolinguistik, Hymes (1968) menjelaskan bahwa unsur-unsur pokok dalam suatu komunikasi adalah: komunikator, komunikan, kontak, situasi dan kondisi serta tempat, massage (bentuk dan objek, kode.⁵

Sedangkan politik dimaknai sebagai (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang system pemerintahan, dasar m pemerintahan); dapat pula bermakna

⁴ Dr. Muhammad Hasan Abd. Aziz. Ilmu al-Lughah al-Ijtima'iy. Op.Cit. h. 92.

⁵ D. Hymes, Toward Ethnographies of communication, in Pier Paolo Giglioli, Language and Social context, h. 22-23.

segala urusan dan tindakan (kenijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain; dapat pula bermakna cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah; kebijakan.⁶

Terkait dengan makna-makna tersebut maka, komunikasi politik adalah komunikasi yang mengandung pesan-pesan politik, yang melibatkan actor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah.

Dalam praktik politik, bahasa sangat memegang peranan besar dalam menyebarkan kekuasaan. Dan bahasa yang digunakan politisi seringkali mencerminkan bangunan dan proses kekuasaan yang dominan. Kekuasaan dalam perspektif politik diartikan sebagai setiap kemampuan, kafasitas dan hak yang dimiliki seseorang, lembaga atau institusi untuk mengontrol perilaku dan kehidupan orang atau kelompok lain. Untuk hal tersebut, maka bahasa dalam praktik proses komunikasi politik, secara konvensional, akan membangun berbagai variasi untuk mencapai target politik yang dimainkan oleh kekuasaan. Setidak-tidaak mereka para penguasa dan atau politisi akan menyuguhkan ***bahasa pengabdian*** atau ***pelayanan***, yaitu memilih variasi bahasa untuk menyusun makna yang merupakan misi pemerintahan mereka dengan melibatkan aspek budaya setempat. ***Bahasa pencitraan***, yaitu bentuk variasi yang memberi penggambaran kesuksesan-kesuksesan yang telah diraih di masa lalu, menutupi kekurangan yang dirasakan, dan memberi pengharapan dimasa datang, ***Bahasa “topeng”***, yaitu upaya penghalusan kata dalam menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya. ***Bahasa regulatory***, yaitu bahasa perintah yang digunakan untuk memberi semangat bekerja. Dan masih banyak lagi ragam bahasa yang lain yang bisa lahir, tergantung dari hubungan-hubungan perubahan social yang ada.

Dr. Abd. Salam seorang pakar sosiolinguistik dari Timur Tengah menyatakan : *“Fikiran mencari kebenaran, dan satu kebenaran dalam perspektif politik, memiliki banyak kebenaran. Fikiran menghargai akhlak mulia dan mengikuti perintahnya, akan tetapi politik hanya sebatas memerintahkan perintah berkahlak mulia. Fikiran menggunakan bahasa untuk menyebarkan fikiran-fikiran lainnya, akan tetapi politik mengatur bahasa itu untuk memperbudak fikiran.”*

III. Kajian Sociolinguistik atas Bahasa Komunikasi Politik.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2003, h. 886.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kajian ini akan mengambil beberapa bahagian saja dari sisi ragam bahasa dalam praktik komunikasi politik. Yaitu :

a. Aspek diksi (pemilihan kata).

Suatu hal yang sangat mendasar untuk dipahami dalam bahasa, bahwasanya bahasa itu bukanlah sekedar susunan kata perkata, berdiri sendiri, tanpa berkaitan dengan yang lainnya untuk mengusung sebuah pengertian. Kata tersebut berjalan terus sepanjang hidupnya dengan membawa berbagai pengertian. Bahkan terkadang memungut pengertian baru dalam perjalanannya, boleh jadi positif dan boleh jadi negative. Karena memang kata susah membendungnya, ia bisa masuk dalam lorong gelap dengan membawa pengertian baru, ia bisa berjalan di jalan luas dan lurus lagi terang dan membawa pengertian yang baru pula tanpa menurunkan atau menghilangkan pengertian lamanya. Kamus mencoba membatasi pengertian sebuah kata, akan tetapi kata tidak bisa dikekang, bagaikan kuda liar yang akan berlari terus dan tak mengenal batas. Ia bisa saja melintas antar benua, antar golongan dan seterusnya. Bahkan ia bisa menembus wilayah-wilayah terlarang yang semula ia tidak memiliki kepentingan. Kata dalam liku-liku perjalanannya terkadang berkhianat menjadi pendukung sebaliknya karena disampaikan dengan intonasi yang bervariasi atau dalam konteks yang lain.

Dalam komunikasi politik sering digunakan kata-kata bersinonim atau kata yang memiliki makna konotatif. Kata yang bersinonim adalah sejumlah kata yang berbeda yang memiliki pengertian yang sama, sedangkan konotatif adalah suatu jenis makna yang muncul sebagai akibat dari asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan/ yang dibaca atau yang kita dengar. Sebenarnya makna konotatif adalah makna yang muncul dari makna kognitif, dan kedalam makna kognitif ditambahkan makna lain.

Pada era perjalanan politik bangsa kita, sering kali digunakan kata sinonim, seperti kenaikan harga menjadi penyesuaian harga, pelacur menjadi Wanita Tuna Susila (WTS) kemudian menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Pembantu rumah tangga menjadi tenaga kerja, mencuri milik Negara menjadi korupsi kemudian menjadi pelanggaran prosedur dan semacamnya.

Dalam pendekatan kebahasaan, bahwa tidak ada satu katapun yang memiliki makna yang sama dengan kata yang lain. Pemilihan kata untuk digunakan sebagai pengganti dari kata yang dianggap serupa maknanya, pasti memiliki makna khusus yang membuat berbeda

dengan kata yang digantikannya. Makna khusus yang dimaksudkan adalah boleh jadi untuk suatu ungkapan yang lembut, samar-samar atau berputar-putar untuk mengganti suatu presepsi yang kasar atau suatu kebenaran yang kurang enak. Penghalusan makna juga sering digunakan untuk menutupi informasi yang sebenarnya sebagai selubung terhadap kenyataan yang jauh lebih mengecewakan. Hal ini pasti membawa dampak meniadakan control social yang efektif dan juga menuntun masyarakat menjadi kurang peka terhadap perkembangan yang terjadi. Variasi bahasa seperti ini digunakan untuk menciptakan citra positif bagi pemerintah.

Demikian pula halnya konotatif sering digunakan dalam komunikasi politik, boleh jadi dimaksudkan untuk mempertegas sesuatu yang dirasa lemah, untuk mendapat perhatian yang serius agar ditangani atau ditertibkan. Disebutkan pernyataan Walikota Makassar dalam surat kabar harian Fajar, sabtu tanggal 5 Juli 2014. “ *Pokoknya habis lebaran, kita sapu semua itu termasuk yang dekat masjid Almarkaz* “. Topik pembicaraan ketika itu adalah pedagang kaki lima. Ucapan tersebut muncul sebagai respon dari belum adanya kesadaran dari PKL untuk memenuhi aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah kota. Jadi tidak mungkin seorang Walikota akan menyapu betul atau melarang keberadaan PK di kota ini. Akan tetapi beliau maksudkan adalah mengusahakan tempat yang cocok untuk PKL tersebut sehingga kota Makassar tampak rapih dan bersih. Dan ketika Satpol PP salah memahami pernyataan tersebut maka pasti terjadi keributan.

Dalam bahasa birokrasi, di kantor pemerintahan ataupun kampus, terutama dalam bahasa disposisi sering digunakan kata-kata konotasi yang memungkinkan ditafsirkan ke dalam pengertian lain, seperti dalam bahasa disposisi, pimpinan cukup menulis “*agar si A dibantu*” atau “ *Supaya si A dibantu* “ atau ditambahkan lagi kata “ *agar si A dibantu seperlunya* atau *secukupnya*”. Disposisi seperti ini akan dimaknai dengan beberapa pemahaman; boleh jadi bermakna si A tersebut harus diluluskan, boleh jadi dimaknai difasilitasi dalam pelaksanaan ujiannya. Ketika seorang bawahan kurang jeli menangkap makna yang dimaksudkan oleh pemimpinnya, maka pasti ia akan mendapat marah dari sang pemimpin.

Jelaslah bahwa kata mempunyai kekuatan. Kata bisa digunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki penuturnya. Kata dalam konteks komunikasi politik bisa menjadi alat perekat

dan pemersatu, membangun semangat kerja dan kebersamaan, disisi lain bisa menjadi alat mainan para politisi. Itulah sebabnya orang berkata “ politik adalah permainan kata-kata “.

2. Aspek morfologi.

Aspek lain dari kajian sociolinguistik adalah, ragam bahasa yang digunakan dalam berbagai bentuk morfologis. Setiap bahasa mempunyai banyak ragam yang dipakai dalam keadaan dan keperluan/tujuan yang berbeda-beda. Ragam-ragam bahasa menunjukkan perbedaan struktur dalam unsur-unsurnya. Salah satu perbedaan struktur itu adalah berbentuk morfologis dari ragam fungsiolek. Perhatian kita bukan hanya pada perubahan tersebut, tetapi lebih banyak difokuskan pada penggunaannya dan kaitannya dengan factor-faktor social.

Bentuk perubahan morfologis tersebut banyak digunakan dalam komunikasi politik, seperti ungkapan Walikota Makassar menjelang pemilukada “ *Anak lorongna Makassar* “. Setelah menjabat lahir lagi berbagai pernyataan beliau anatara lain “ *Mari ki sukseskan MTR Makassar ta tidak Rantasa Menuju Kota Sehat*”. Pak Dany Pamanto menggunakan ragam akrab (Intimate style) baik menjelang pemilu, maupun dalam pelaksanaan program pemerintahannya. Hal itu dapat dimaknai sebagai bentuk keakraban, kebersamaan dengan kelompok masyarakat kota Makassar untuk memudahkan mendapat dukungan dalam menyukseskan programnya. “ na” pada kata lorongna mengandung makna prestise seorang anak lorong atau anak pinggir yang kurang mendapat fasilitas, maju mencalonkan diri menjadi Walikota. Sekalipun keadaan beliau tidak seperti itu sesungguhnya. “ki” pada kata “ mari” lasim digunakan dikalangan kelompok masyarakat Bugis Makassar yang bermakna; penghormatan dan penghargaan terhadap orang yang dilawan berbicara. Kesannya sungguh sangat berbeda jika menggunakan bahasa resmi (formal style) dalam menyatakan honorific (penghormatan) disbanding dengan ragam bahasa intim. Demikian pula halnya morfem “ ta” yang melekat pada kata Makassar, selain mengandung makna honorific (penghormatan) juga mengandung makna kepemilikan bersama. Yakni Makassar ini miliki kita bersama untuk dijaga kebersihannya.

Untuk aspek ini, Pak Dany Pamanto berupaya membangun komunikasi politik yang raamah dan santun. Memahami budaya masyarakat yang dipimpinnya.

3. Spek sintaksis atau atruktur kalimat.

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa ragam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, termasuk komunikasi politik terbentuk dari berbagai perubahan pada unsur-

unsurnya. Tidak terkecuali unsur struktur kalimatnya. Meskipun demikian yang menjadi focus kajian bukaan hanya pada perubahan tersebut, melainkan pada penggunaannya dan kaitannya dengan factor-faktor social yang meliputinya. Pilihan kalimat dalam membangun komunikasi sangat banyak.

Dalam komunikasi politik, ada penggunaan berbagai macam kalimat, diantaranya kalimat deklaratif, dan kalimat imperative, dalam bahasa Arab dikenal khabariyah dan Insyaiyah. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan atau pemberitaan, dan kalimat imperative adalah kalimat perintah. Jimly Ashiddiqie, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan dalam komunikasi politiknya: “ *Kalau ada PNS yang berpihak dan yang dia dukung adalah kalah, mereka terancam dipecat. Memang DKPP tidak berhak, tapi kami punya data. Kami akan kasih ke Presiden terpilih untuk dipecat*”. Seperti dikutip oleh harian Fajar Sabtu, tanggal 5 Juli 2014.

Konsekwensi pernyataan tersebut sangat jauh. Kalimat tersebut mengandung pengertian jangan sekali-kali ada usaha untuk melibatkan diri bagi PNS mendukung atau mengkampanyekan salah seorang kandidat Presiden. Ucapan tersebut muncul karena diduga banyaknya PNS yang tidak netral dalam Pemilu Presiden 2014.

Pada masa pemerintahan Abd. Rahman Wahid, ada kalimat yang sering dilontarkan oleh beliau seperti :” *Gitu aja kok repot* “. Kalimat ini masih tergolong kalimat deklaratif, tetapi bermakna imperative. Karena yang dimaksudkan dari kalimat tersebut adalah larangan untuk sibuk mempermasalahkan hal-hal yang kecil, masih banyak permasalahan besar yang harus dihadapi bersama.

Demikian pula halnya yang dilontarkan oleh Ketua DPRD Luwu Utara: “ *Pelanggaran apa yang saya lakukan ? “ sementara saya tidak pernah mengajak orang yang hadir untuk memilih salah seorang calon*”. Seperti dikutip dalam surat kabar Fajar sabtu, 5 Juli 2014. Kalimat tersebut adalah kalmat tanya akan tetapi makna sesungguhnya adalah pernyataan tegas tidak melakukan pelanggaran. Ucapan tersebut muncul setelah Ketua DPRD Luwu Utara mangkir dari panggilan Panwaslu setempat untuk klrifikasi terkait dugaan berkampanye di kantor Bupati.

Demikian sekilas penjelasan yang terkait dengan pokok kajian kita; Kontribusi Soisolvingistik dalam Pemahaman Komunifikasi Politik. Dan masih banyak aspek yang perlu

diketengahkan yang terkait dengan judul ini. Dan itu menjadi tugas kita semua sebagai insan akademik yang mendalami ilmu kebahasaan dan ilmu komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Abd. Rahman Wafi, Doktor, *Al-Lughah Wal Mujtama'*, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Kairo 1946.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2003.
- Hymes, D, *Toward Ethnographies of Communication*. In pier Paolo Giglioli, *Language and social Context*.1978.
- Muhammad Ali Al-Khuli, DR. *A Dictionary of Theoretical Linguistics*, Librairie Du Liban, 1982.
- Mohammad Hasan, Abd. Aziz, Doktor, *Ilmu al-Lughah al-Ijtima'I*, Maktabah al-Adab,Kairo : 2009.
- Nababan. P.W.J., *Sosiolinguistik (Suatu Pengantar)*, PT. Gramedia Jakarta. 1984.
- Syamsul Hadi, Prof.Dr., dkk, (Reviewers), *The Role of Arabic Language in The Development of Civilization*, IMLA. 2011.